

KESELAMATAN KAPAL PENANGKAP IKAN, TINJAUAN DARI ASPEK REGULASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

(Fishing Vessel Safety from National and International Regulations Point of View)

Djodjo Suwardjo^{1,2}, John Haluan³, Indra Jaya³ dan Soen'an H. Poernomo⁴

Gedung Mina Bahari 3, Lt. 8, Jl. Medan Merdeka Timur No.16

021-3519070 Ext: 6089, 6078 Fax: 021-3500132

djodjosuwardjo@yahoo.com

ABSTRACT

Fishing is a high risk occupation compared to other occupations. Characteristics of the occupational in fishing vessel are dangerous, dirty and difficult, known as "3d". Generally, fishing vessels size is relatively small size, majority under 24 m length, sailing and fishing in bad weather with rough sea with unskilled crews, so that those factors can increase the fatality rate of the fishing vessel crews. Fishing vessel safety is a complex interactions among human factor (skipper and crew's members), machines (fishing vessel and safety equipment) and environmental (weather and fisheries management). Fishing safety problems emerge when minimum one of those elements of human factor, machines or environment is misfunction. The objectives of this research is to identify national and international safety regulations for fishing vessel and also relationship between fishing vessel and merchant vessel safety policies in Indonesia. Research was carried out from May 2008 – March 2009. Data was collected from any kind of source, such as Agency for Marine and Human Resource Development, Directorate General of Capture Fisheries, Tegal Coastal Fishing Port, Pekalongan Archipelago Fishing Port, Cilacap Ocean Fishing Port and Ministry of Communication. Fishing vessel safety policy basically is based on fishing vessel's seaworthiness, watchkeeping/ship manning, safety equipment, and pollution prevention from the ship activities in national level as well as international level. Fishing vessel seaworthiness and watchkeeping/ship manning policies as a control function from the government to the parties involved in fishing activities to increase safety of crews, fishing vessel and sea environment from fishing vessel activities. Due to the characteristics of the working conditions on fishing vessel, more complex social environment of the fishermen and great number of fishermen in Indonesia, regulations on fishing vessel safety; watchkeeping/ship manning; works in fishing; education, training and certification of fishing vessel personnel; and fishing port, should be separated from the merchant ship safety regulations as international organizations did.

Keywords: *fishing vessel safety, watchkeeping/ship manning, human factor*

ABSTRAK

Pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain, maka profesi pelaut kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan "3d" yaitu: membahayakan (*dangerous*), kotor (*dirty*) dan sulit (*difficult*) dengan ketiga sifat pekerjaan tersebut ditambah faktor ukuran kapal yang didominasi kapal-kapal berukuran relatif kecil, berlayar pada perairan gelombang tinggi dengan kondisi cuaca tidak menentu sehingga dapat meningkatkan tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan. Keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor yang kompleks, yakni *human factor* (nakhoda dan anak buah kapal), *machines* (kapal dan peralatan keselamatan) dan *environmental* (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). Permasalahan keselamatan atau kecelakaan akan timbul apabila salah satu elemen dari *human factor*, *machines* atau *environmental factor* tersebut tidak berfungsi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peraturan keselamatan kapal penangkap ikan pada tingkat nasional dan internasional serta keterkaitan kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan dan kapal niaga. Penelitian dilaksanakan Mei 2008 – Maret 2009. Data primer diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal Sari Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Kementerian Perhubungan. Kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan pada dasarnya mencakup kebijakan kelaikan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, dan pencegahan polusi laut dari kegiatan kapal penangkap ikan, baik pada tataran nasional maupun internasional. Pengaturan kelaikan dan dinas jaga kapal/pengawakan kapal penangkap ikan merupakan pengawasan atau kontrol dari pemerintah terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan untuk meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut. Mengingat karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan membahayakan awak kapal dan lingkungan sosial lebih kompleks, serta jumlah nelayan yang begitu banyak, maka di Indonesia, pengaturan tentang kelaiklautan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, kepelautan kapal perikanan dan pelabuhan perikanan sebaiknya diatur tersendiri, sebagaimana pengaturan pada tataran internasional telah diatur terpisah dari pengaturan kapal niaga.

Kata kunci: keselamatan kapal penangkapan ikan, dinas jaga kapal, kesalahan manusia

¹ Corresponding author

² Staf Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSPMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan

³ Staf Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK- IPB

⁴ Kepala Pusat Statistik dan Informasi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan